BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses untuk memastikan hukum diterapkan secara konsisten, adil, dan efektif dalam masyarakat, dengan tujuan untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan memberikan efek jera terhadap pelanggar hukum. Penegakan hukum tidak hanya berfokus pada pemberian hukuman, tetapi juga mencakup pencegahan pelanggaran hukum dan pemulihan yang berfokus pada keadilan sosial (Efendi, 2023: 17).

Berikut adalah definisi penegakan hukum menurut beberapa ahli, antara lain:

1. Bambang Sunggono

“Menurut Bambang Sunggono, penegakan hukum adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memastikan kepastian hukum di masyarakat. Dalam penegakan hukum, tidak hanya diutamakan tentang pemberian hukuman, tetapi juga upaya untuk menjamin agar norma hukum diterapkan sesuai dengan nilai keadilan yang ada dalam masyarakat (Sunggono, 2021: 62).

2. Siti Maziyah

“Menurut Siti Maziyah, penegakan hukum adalah proses sistematis yang bertujuan untuk mengatur kehidupan sosial melalui penerapan aturan hukum, serta untuk memastikan bahwa hukum dapat memberikan keadilan bagi semua pihak. Dalam perspektif ini, penegakan hukum lebih dari sekadar melaksanakan peraturan, namun juga mengarah pada penyelesaian sengketa dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan proses yang transparan dalam sistem hukum (Maziyah, 2022: 532).

3. Munir Fuady

Munir Fuady dalam bukunya "Prinsip-prinsip Hukum Pidana" menyatakan bahwa penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan keadilan yang lebih luas, yakni memastikan tidak hanya terwujudnya kepastian hukum, tetapi juga keadilan yang seimbang dan berkeadilan sosial. Penegakan hukum juga dilihat sebagai proses yang melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat, selain dari peran lembaga penegak hukum. Penegakan hukum yang efektif, menurut Fuady, juga

harus memperhatikan konteks sosial, ekonomi, dan budaya yang ada di masyarakat (Fuady, 2023: 99).

4. Rudolf Schüssler

Rudolf Schüssler, dalam bukunya "*Restorative Justice in Contemporary Legal Systems*", menjelaskan bahwa penegakan hukum merupakan suatu proses yang bertujuan untuk tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memperbaiki kerugian yang dialami oleh korban serta menjaga keharmonisan dalam masyarakat. Schüssler menekankan bahwa pendekatan restoratif dalam penegakan hukum dapat menciptakan solusi yang lebih baik untuk semua pihak yang terlibat, yaitu pelaku, korban, dan masyarakat, dalam rangka mengurangi ketegangan sosial (Schüssler, 2023: 49.).

2.2. Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

2.2.1. Pengertian Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif adalah sebuah pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang lebih menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku tindak pidana, korban, dan masyarakat, daripada sekadar pemberian hukuman kepada pelaku. Tujuan utama dari keadilan restoratif adalah untuk memperbaiki kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana, baik terhadap korban, pelaku, maupun masyarakat, dengan cara yang berfokus pada penyelesaian yang konstruktif dan rehabilitatif (Flora, 2018: 142).

Dalam pendekatan ini, perhatian diberikan pada perbaikan hubungan dan pemulihan keadaan yang lebih baik untuk semua pihak yang terlibat. Keadilan restoratif bukan hanya untuk mencari kesalahan, tetapi lebih kepada bagaimana mengembalikan keseimbangan sosial yang terganggu akibat tindak pidana, sehingga keadilan dapat tercapai bagi semua pihak (Flora, 2018: 143).

2.2.2. Unsur-Unsur Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif memiliki karakteristik atau unsur-unsur utama yang membedakannya dari sistem peradilan konvensional. Unsur-unsur ini menjadi landasan dalam penerapan pendekatan restoratif dan berperan penting dalam mencapai tujuan pemulihan atas akibat dari suatu tindak pidana. Berikut adalah unsur-unsur penting dari keadilan restoratif:

1. Partisipasi Sukarela dari Korban, Pelaku, dan Pihak Terkait Lainnya

Partisipasi dalam proses keadilan restoratif dilakukan secara sukarela oleh semua pihak yang terlibat, termasuk korban, pelaku, keluarga, serta komunitas atau tokoh masyarakat. Artinya, tidak ada unsur paksaan, intimidasi, ataupun tekanan dari pihak manapun. Keterlibatan sukarela ini memungkinkan terbentuknya komunikasi yang jujur dan efektif. Proses restoratif tidak dapat berlangsung apabila salah satu pihak tidak bersedia untuk berpartisipasi, karena keterlibatan aktif dari semua pihak merupakan syarat mutlak demi terciptanya keadilan yang bersifat memulihkan (Irawan, 2022:26).

2. Dialog Terbuka dan Jujur Mengenai Dampak dari Tindakan Pelaku

Salah satu inti dari keadilan restoratif adalah adanya ruang dialog yang terbuka dan jujur antara korban dan pelaku. Dalam dialog ini, korban diberi kesempatan untuk menyampaikan perasaan, luka batin, dan dampak yang mereka alami akibat tindakan pelaku. Sebaliknya, pelaku

juga diberikan ruang untuk mengungkapkan motivasi tindakannya, rasa penyesalan, serta kesediaannya untuk bertanggung jawab. Proses ini bertujuan untuk membangun empati di antara kedua belah pihak, memperkuat pemahaman bersama, dan mendukung pemulihan emosional (Yunus, 2021:119).

3. Pemulihan atas Kerugian yang Diderita Korban, Baik Secara Material Maupun Emosional

Keadilan restoratif menekankan pentingnya pemulihan korban, tidak hanya dalam bentuk kompensasi atau ganti rugi secara materi, tetapi juga dalam bentuk pemulihan psikologis dan sosial. Pemulihan ini mencakup pengakuan penderitaan korban, permintaan maaf dari pelaku, serta tindakan-tindakan nyata untuk memperbaiki dampak yang ditimbulkan. Dalam beberapa kasus, pemulihan dapat berupa restitusi, pelayanan masyarakat, atau bentuk lain yang disepakati bersama dalam proses dialog (Yunus, 2021:121).

4. Tanggung Jawab dari Pelaku untuk Memperbaiki Akibat Perbuatannya

Berbeda dengan sistem peradilan pidana tradisional yang hanya menekankan pada penghukuman, keadilan restoratif mengharuskan pelaku untuk menyadari dan mengakui perbuatannya, serta bertanggung jawab secara aktif dalam memperbaiki akibat dari tindakannya. Tanggung jawab ini bukan hanya secara hukum, tetapi juga secara moral dan sosial. Melalui kesadaran dan pertobatan, pelaku diharapkan

dapat berubah menjadi pribadi yang lebih baik dan kembali diterima oleh masyarakat (Irawan, 2022:41).

5. Kesepakatan Bersama dalam Bentuk Perjanjian atau Tindakan Pemulihan

Salah satu hasil penting dari proses keadilan restoratif adalah tercapainya kesepakatan bersama antara korban dan pelaku, yang dituangkan dalam bentuk tertulis atau lisan. Kesepakatan ini dapat mencakup bentuk ganti rugi, permintaan maaf, kerja sosial, atau tindakan lain yang dianggap pantas untuk memulihkan kerugian korban. Kesepakatan ini harus disepakati oleh semua pihak secara sadar dan tanpa paksaan. Dalam beberapa sistem hukum, kesepakatan tersebut juga bisa menjadi dasar untuk penghentian proses hukum (*deponering* atau *diversi*) (Yani, 2023: 314).

6. Non-Punitif, Yaitu Tidak Berfokus pada Penghukuman Semata, tetapi pada Pemulihan

Ciri khas utama dari keadilan restoratif adalah pendekatannya yang non-punitif. Artinya, proses ini tidak berfokus pada pemberian hukuman bagi pelaku, tetapi pada pemulihan terhadap kerugian yang ditimbulkan, baik bagi korban, pelaku, maupun masyarakat. Tujuannya adalah untuk membangun kembali hubungan sosial yang rusak, serta menciptakan kondisi damai yang berkelanjutan (Yani, 2023: 317).

2.2.3. Prinsip Keadilan Restoratif

1. Pertanggungjawaban Pelaku

Pelaku tindak pidana diharapkan untuk mengakui kesalahannya dan bertanggung jawab atas tindakannya. Namun, pertanggungjawaban ini tidak hanya berupa hukuman, tetapi juga berupa usaha untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan, baik melalui permintaan maaf atau dengan cara lain yang membantu memperbaiki situasi (Yunus, 2021:89).

2. Pemulihan Kerugian

Fokus dari keadilan restoratif adalah untuk memulihkan kerugian yang dialami oleh korban. Ini bisa berupa pemulihan emosional, psikologis, atau material bagi korban. Hal ini dilakukan melalui dialog atau bentuk lainnya yang memungkinkan korban merasa dihargai dan didengar (Yunus, 2021:92).

3. Dialog antara Pihak yang Terlibat

Salah satu mekanisme utama dalam keadilan restoratif adalah proses dialog atau mediasi antara korban, pelaku, dan pihak terkait lainnya. Ini memberikan kesempatan bagi semua pihak untuk berbicara, mendengarkan, dan mencari solusi yang dianggap adil bagi semua pihak yang terlibat (Yunus, 2021:92).

4. Rehabilitasi Pelaku

Selain memulihkan korban, keadilan restoratif juga fokus pada rehabilitasi pelaku. Pendekatan ini bertujuan untuk membantu pelaku

memahami dampak dari perbuatannya dan mendorongnya untuk melakukan perubahan positif dalam perilaku mereka agar tidak mengulangi tindakannya di masa depan(Yunus, 2021:95).

5. Penghindaran Pembalasan

Keadilan restoratif menekankan pentingnya menghindari siklus balas dendam atau pembalasan. Dalam prosesnya, diharapkan tercipta pemahaman yang lebih dalam antara korban dan pelaku, sehingga mengurangi potensi konflik sosial lebih lanjut(Yunus, 2021:95).

2.3. Pelaku Perkara Penganiayaan

Pelaku perkara penganiayaan adalah individu yang melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap orang lain yang menyebabkan korban mengalami cedera atau rasa sakit. Penganiayaan merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia, khususnya dalam Pasal 351 yang mengatur tentang penganiayaan dengan bunyi "(1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. (3) Jika perbuatan itu mengakibatkan mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan. (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana." . Pelaku dalam kasus penganiayaan ini bisa berupa siapa saja yang melakukan kekerasan terhadap orang lain tanpa alasan yang sah (Puspitasari, 2024: 969).

Jenis-Jenis Penganiayaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tahun 2016 Pasal 351 tentang Penganiayaan:

1. Penganiayaan Ringan (Pasal 351 Ayat 1 KUHP)

Penganiayaan ringan mengacu pada tindakan kekerasan fisik yang tidak menimbulkan akibat yang serius terhadap korban, seperti luka ringan atau memar. Tindak pidana dengan pidana penjara maksimal 2 tahun 8 bulan, sesuai dengan ketentuan dalam (KUHP).ini dapat dihukum (Puspitasari, 2024: 982)

2. Penganiayaan Berat (Pasal 351 Ayat 2 KUHP)

Penganiayaan berat terjadi jika akibat dari tindakan penganiayaan tersebut menyebabkan korban mengalami luka berat atau cacat permanen. Penganiayaan berat dihukum lebih berat, dengan ancaman pidana penjara yang lebih lama(Puspitasari, 2024: 983).

3. Penganiayaan dengan Penggunaan Senjata atau Benda Tajam (Pasal 352 KUHP)

Penganiayaan yang dilakukan dengan menggunakan alat atau senjata tajam atau benda berbahaya lainnya dapat mengakibatkan ancaman hukuman yang lebih berat, karena dianggap lebih berbahaya dan mengancam keselamatan korban(Puspitasari, 2024: 985).

2.4. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif disusun sebagai tindak lanjut

dari kebijakan reformasi di bidang hukum pidana di Indonesia, yang bertujuan untuk mengurangi beban perkara yang ditangani oleh pengadilan dan lebih memprioritaskan pemulihan hubungan sosial antara korban dan pelaku.

2.4.1. Prinsip Yang Harus Dipenuhi Sebelum Penuntutan

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif mengatur beberapa prinsip yang harus dipenuhi sebelum penuntutan dapat dihentikan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tahun 2016 Pasal 351 tentang Penganiayaan, di antaranya:

1. Keadilan Restoratif

Mengedepankan prinsip penyelesaian perkara melalui perdamaian antara pelaku dan korban, yang dapat menghasilkan pemulihan hubungan dan penghindaran pembalasan (Pane, 2023 1419).

2. Pentingnya Kepentingan Publik

Penghentian penuntutan hanya dilakukan jika tidak ada ancaman bagi kepentingan publik dan tidak merugikan kepentingan hukum masyarakat secara umum (Pane, 2023 1419).

3. Tindak Pidana yang Tidak Berat

Penghentian penuntutan dapat dilakukan untuk perkara pidana yang tidak diancam dengan pidana penjara lebih dari 5 tahun atau yang tidak tergolong tindak pidana berat (Pane, 2023 1420).

4. Persetujuan Semua Pihak

Penghentian penuntutan hanya dapat dilakukan jika ada kesepakatan antara pelaku, korban, dan pihak terkait lainnya. Tidak ada unsur paksaan, tekanan, atau penipuan dalam proses perdamaian(Pane, 2023 1420).

2.4.2. Syarat Yang Harus Dipenuhi Sebelum Penghentian Penuntutan

Beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum penghentian penuntutan dapat dilakukan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tahun 2016 Pasal 351 tentang Penganiayaan, antara lain:

1. Tindak Pidana yang Dilakukan Tersangka

Tersangka harus pertama kali melakukan tindak pidana dan tindak pidana yang dilakukan tidak diancam dengan pidana yang berat (Lathif, 2019:154).

2. Kerugian yang Dapat Dipulihkan

Dalam perkara yang bersifat ringan atau menengah, kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana dapat dipulihkan atau diselesaikan melalui ganti rugi atau tindakan lain yang disepakati (Lathif, 2019:154).

3. Keinginan untuk Berdamai

Para pihak yang terlibat dalam perkara harus sepakat untuk menyelesaikan perkara secara damai dan tidak ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun (Lathif, 2019:155).

4. Pertimbangan Sosial dan Kemanusiaan

Faktor-faktor seperti kondisi sosial, kemanusiaan, dan psikologis pelaku, serta dampaknya terhadap masyarakat juga menjadi pertimbangan dalam penghentian penuntutan(Lathif, 2019:155).

2.4.3. Pasal Yang Mengatur Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Berikut adalah beberapa pasal yang mengatur Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif:

1. Pasal 1: Mengatur tentang definisi-definisi yang digunakan dalam peraturan ini, seperti definisi penuntutan, penghentian penuntutan, dan istilah lainnya yang relevan.
2. Pasal 2: Mengatur tentang asas dan tujuan dari penghentian penuntutan, yang bertujuan untuk mencapai keadilan yang berpihak pada kepentingan masyarakat.
3. Pasal 4: Mengatur mengenai kriteria atau syarat-syarat penghentian penuntutan, termasuk jenis-jenis perkara yang dapat dihentikan penuntutannya.
4. Pasal 5: Mengatur tentang dasar hukum penghentian penuntutan, yang mencakup beberapa alasan dan kondisi di mana penghentian penuntutan dapat dilakukan, seperti tidak cukup bukti atau kejahatan yang ringan.

5. Pasal 8: Menyebutkan prosedur penghentian penuntutan, termasuk langkah-langkah yang harus diambil oleh jaksa dalam mengambil keputusan untuk menghentikan penuntutan.
6. Pasal 10: Mengatur tentang proses pertimbangan yang harus dilakukan oleh Jaksa dalam mengambil keputusan penghentian penuntutan, termasuk evaluasi bukti dan berbagai faktor lain.
7. Pasal 12: Mengatur mengenai keputusan penghentian penuntutan, yang harus disertai dengan alasan hukum yang jelas dan disampaikan kepada pihak terkait.
8. Pasal 15: Mengatur tentang penghentian penuntutan dengan pendekatan *restorative justice*, yang lebih menekankan pada penyelesaian perkara secara damai antara pelaku dan korban.
9. Pasal 17: Mengatur tentang penghentian penuntutan dengan cara non-litigasi, di mana penyelesaian perkara dilakukan di luar pengadilan.